

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA DI KALIMANTAN TENGAH**

**Nadya Chinthya, Muhammad Handry Imansyah, Dewi Rahayu**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

E-mail: nadyachinthya@gmail.com, mhimansyah@ulm.ac.id, dewirahayu@ulm.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel, menggunakan data panel tahun 2010-2019 pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik estimasi data panel yang digunakan adalah *fixed effect model (FEM)* dengan pendekatan *generalized least square (GLS)*. Hasil yang diperoleh yaitu secara simultan upah minimum, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Secara parsial upah minimum dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Pendapatan perkapita dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

**Kata kunci:** Upah minimum, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, sektor pertanian

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effect of the minimum wage, per capita income, open unemployment rate, government education expenditure, government health expenditure, and the agricultural sector on the poverty level of districts/cities in Central Kalimantan. The analytical tool used is panel data regression, by using panel data for 2010-2019 in 14 districts/cities in Central Kalimantan Province.*

<b>How to cite:</b>	Nadya Chinthya, Muhammad Handry Imansyah, Dewi Rahayu (2022) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah, (7) 10. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13233
<b>E-ISSN:</b>	2548-1398
<b>Published by:</b>	Ridwan Institute

*The panel data estimation technique used is a fixed effect model (FEM) with a generalized least square (GLS) approach. The results obtained that simultaneously the minimum wage, per capita income, open unemployment rate, government education expenditure, government health expenditure, and the agricultural sector have a significant effect on the poverty level of districts/cities in Central Kalimantan. Partially, the minimum wage and government spending on education have a negative and significant effect on the poverty level of districts/cities in Central Kalimantan. Per capita income and government expenditure on health have a positive and significant impact on poverty in districts/cities in Central Kalimantan. Meanwhile, the open unemployment rate and government spending on health have no significant effect on the poverty level of districts/cities in Central Kalimantan.*

**Keywords:** *Minimum wage, per capita income, open unemployment rate, government education expenditure, government health expenditure, agriculture sector.*

## **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih menjadi fokus yang berusaha dituntaskan atau setidaknya dikurangi di setiap negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah senantiasa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,41% dari jumlah penduduk per Maret 2019 atau mencapai 25,14 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan Maret 2018 yang berada di angka 9,82% atau 25,95 juta jiwa, angka kemiskinan turun sebesar 41 basis poin (bps) atau sebanyak 810 ribu jiwa. Dari 34 provinsi, terdapat 16 provinsi yang memiliki angka kemiskinan di atas angka nasional dan 18 provinsi lainnya berada dibawah angka nasional (Badan Pusat Statistik, 2020).

Lima provinsi yang memiliki angka kemiskinan terbesar berada di kawasan timur Indonesia. Provinsi tersebut adalah Papua (26,55%), Papua Barat (21,51%), Nusa Tenggara Timur (20,62%), Maluku (17,65%), dan Gorontalo (15,31%). Sedangkan lima provinsi yang memiliki angka kemiskinan terendah adalah DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Faktanya pada tahun 2019 sekitar 4,81% penduduk di Kalimantan Tengah merupakan penduduk miskin. Secara umum jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah selama 10 Tahun terakhir yaitu sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah mencapai 166.003 jiwa sedangkan pada tahun 2019 mencapai 134.590 jiwa artinya telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 31.413 jiwa. Tetapi jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 431 jiwa, dari yang sebelumnya berjumlah 48.127 jiwa pada September 2018 menjadi 48.558 jiwa pada Maret 2019, sementara di daerah perdesaan berkurang sebanyak 2.283 orang, dari yang

sebelumnya berjumlah 88.319 jiwa pada September 2018 menjadi 86.036 jiwa pada Maret 2019.

Berbeda dengan jumlah penduduk miskin, daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah berada di Kabupaten Seruyan (17,9%), Kabupaten Barito Timur (6,32%), dan Kabupaten Murung Raya (6,0 %). Sedangkan daerah dengan persentase penduduk miskin terendah berada di Kabupaten Lamandau (3,01%), Kabupaten Sukamara (3,16), dan Kota Palangkaraya (3,35%).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2020). Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan (*poverty line*), konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan *absolute* (Tambunan, 2001).

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan di Kalimantan Tengah sebesar 79,05 persen jauh lebih besar dari peranan komoditi bukan makanan. Tiga jenis komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan di Kalimantan Tengah adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras untuk daerah perkotaan sedangkan daerah perdesaan dipengaruhi oleh beras, rokok kretek filter, telur ayam ras. Kemudian terdapat lima komoditi bukan makanan yang paling dominan yaitu biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan dan perlengkapan mandi (Widodo et al., 2011).

Menurut Aprilia (2016) salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah upah minimum. Dalam penelitiannya menyebutkan adanya pengaruh yang negatif dan signifikan antara upah minimum dan kemiskinan di Jawa Timur. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Jika kebutuhan hidup layak dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan terbebas dari masalah kemiskinan.

Selain upah minimum Aprilia (2016) juga menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka juga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan penelitian Fadlillah et al., (2016) yang juga menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Menurut Sukirno (2004) efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin rendah kesejahteraan masyarakat akibat menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Dalam penelitian yang sama Fadlillah et al., (2016) juga menyebutkan adanya faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah yaitu pendapatan perkapita

dimana memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran bagi tiap daerah. Semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2006).

Intervensi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tentunya masih sangat diperlukan. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah Kalimantan Tengah telah mengeluarkan banyak kebijakan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan melalui sekolah dan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 tentang Kesehatan agar mengalokasikan 20 persen untuk sektor pendidikan dan 10 persen untuk sektor kesehatan.

Menurut Baruwadi (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Gorontalo. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan.

Struktur perekonomian kabupaten/kota di Kalimantan Tengah relatif bervariasi. Secara umum Lapangan Usaha Pertanian masih mendominasi kecuali Kota Palangka Raya. Lapangan usaha lainnya yang cukup berperan penting dalam perekonomian kabupaten/kota adalah Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Pertambangan dan Penggalan.

Dalam sektor pertanian peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, khususnya padi merupakan tanaman unggulan dan prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pemerintah terus berupaya mengoptimalkan lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas. Hal ini menjadi penting karena Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau di gadang-gadang akan menjadi Lumbung Pangan Nasional atau *Food Estate*.

Selain padi, salah satu sub sektor pertanian Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan yang paling menonjol adalah perkebunannya. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit di pulau Kalimantan terletak di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah menjadi sentra produksi kelapa sawit dan memberikan kontribusi ekonomi yang besar untuk PDRB masing-masing daerah yang berada di Kalimantan Tengah, yang juga merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia selain Provinsi Riau dan Sumatera.

Sihombing & Bangun (2019) melakukan analisis korelasi sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera utara menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan yang bersifat negatif antara sektor pertanian dengan kemiskinan. Sejalan dengan penelitian Purnami & Saskara (2016) menemukan bahwa kontribusi sektor pertanian berpengaruh signifikan positif pada kemiskinan. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak yaitu sebesar 38,1% dan hal ini diharapkan dapat menurunkan kemiskinan.

Penelitian dalam tesis ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan terutama dilihat dari periode waktu penelitian dan pendekatan analisis datanya. Penelitian ini dilakukan di 14 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan periode Tahun 2010-2019 dengan menggunakan Analisis Regresi Data Panel . Variabel yang digunakan adalah Upah Minimum, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Sektor pertanian.

Kemudian dari aspek fenomena empiris Kalimantan Tengah berbeda dengan Provinsi-Provinsi lainnya di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Kalimantan Tengah justru mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan faktanya Kalimantan Tengah berada di posisi ke-5 kategori Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin terendah setelah Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, serta Kepulauan Riau. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan kepada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengidentifikasi apakah Upah Minimum, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Sektor pertanian secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. (2) Untuk mengidentifikasi faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Manfaat penelitian ini adalah : (1) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau sumbangan dari pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan masalah kemiskinan. (2) Sebagai bahan referensi peneliti lain yang sedang melakukan penelitian dalam bidang sejenis. (3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta memperkaya pustaka dan menambah pengalaman bagi penulis.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemiskinan yang ada di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Variabel yang digunakan adalah Upah Minimum (X1), Pendapatan Perkapita (X2) Tingkat Pengangguran Terbuka (X3), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X4), Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X5) dan Sektor Pertanian (X6). Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian (Sugiyono, 2014). Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel.

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Gujarati & Porter (2003) besarnya  $R^2$

dikenal sebagai koefisien determinasi (sampel) yang merupakan ukuran paling umum digunakan untuk mengukur *goodness of fit* dari sebuah garis regresi. Nilai tersebut melihat seberapa besar proporsi atau presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tingkat ketepatan regresi ditentukan oleh besarnya nilai *adjusted R<sup>2</sup>* antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin nilai  $R^2$  mendekati angka 1, berarti variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen dengan semakin baik.

#### Uji Simultan ( Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen.

Pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :

H0:  $\beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ , artinya semua variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

H1:  $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ , artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Keputusan diambil dengan cara melakukan perbandingan terhadap F hitung dengan F tabel. H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung < F tabel, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. H0 ditolak dan H1 diterima apabila F hitung > F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

#### Uji Parsial (Uji t)

Menurut Gujarati & Porter (2003) uji signifikansi merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar pengujian signifikansi dilatar belakangi oleh uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik di bawah hipotesis nol.

Hipotesis dalam uji t-statistik adalah :

H0:  $\beta_i = 0$  Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H1:  $\beta_1 \neq 0$  Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Sebuah statistik dikatakan signifikan secara statistik apabila nilai dari uji statistiknya berada di daerah tolak. Sebaliknya, sebuah pengujian dikatakan tidak signifikan secara statistik, jika nilai dari uji statistiknya berada di daerah penerimaan. H0 diterima jika t hitung > t tabel, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. H1 diterima jika t hitung < t tabel, artinya ada pengaruh antara signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Selain itu tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat melalui nilai probabilitas t dari setiap variabel independen pada hasil regresi data panel dengan alpha atau taraf nyata. Jika p-value atau nilai probabilitas  $t < \alpha$  maka menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hasil dan Analisis

Dalam pembahasan menjawab hipotesis adalah mengestimasi model regresi terlebih dahulu sesuai dengan teknik analisis yang ditemukan dalam metode penelitian. Peneliti dengan bantuan program Eviews 9 memperoleh hasil perhitungan koefisien regresi tiap variabel penelitian yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Regresi Data Panel**

<i>Dependent Variable : Tingkat Kemiskinan</i>			
Variabel	<i>Common Effect</i>	<i>Fixed Effect (GLS)</i>	<i>Random Effect</i>
Konstanta	33,8413***	40,96036***	39,80571***
UM	-2,258814***	-2,846332***	-2,440796***
PKP	-0,938009	0,949902*	0,336179
TPT	-0,083574	-0,006662	-0,054278*
EDUC	-0,360054**	-0,078424*	-0,087561
HEALTH	0,702373***	0,104714	0,074348
FARM	0,002224	0,077676**	0,025950
R-square	0,339681	0,947062	0,717941
Adj R-square	0,309892	0,938680	0,705216
F-test	11,40295	112,9894	56,42195
Durbin Watson	0,172792	1,288860	0,845725
Uji Redundant		69,441448***	
Uji Hausman			31,377634***

Sumber: Hasil Olah Data Regresi Panel Data dengan Eviews (Lampiran)

Keterangan : \* = signifikan pada alpha 10%      \*\*\* = signifikan pada alpha 1%

\*\* = signifikan pada alpha 5%

Berdasarkan hasil regresi data panel maka dapat dilihat bahwa model *common effect* memiliki r-square sebesar 0,339681 atau 33,96%. Model *fixed effect* memiliki r-square sebesar 0,947062 atau 94,70%. Sedangkan model *random effect* memiliki r-square sebesar 0,717941 atau 71,79%. R-square disebut juga sebagai koefisien determinasi yang menjelaskan seberapa jauh variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berdasarkan nilai r-square model *fixed effect* adalah yang memiliki nilai tertinggi yaitu 94,70%.

Penentuan model yang paling tepat antara model *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* dapat dilihat dari pengujian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini uji redundant/ uji chow digunakan untuk menentukan model estimasi terbaik antara model *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dari uji redundant/ uji chow sebagai berikut.

H0: model *common effect*

H1: model *fixed effect*

Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) dapat disimpulkan model estimasi yang terbaik adalah model *fixed effect*, yang berarti  $H_0$  ditolak. Berdasarkan Tabel 5.5 hasil uji redundant/ menunjukkan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan  $\alpha=1\%$  yang berarti hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, maka model yang terbaik adalah model *fixed effect*.

Selanjutnya dilakukan uji hausman untuk menentukan model estimasi antara model *fixed effect* atau model *random effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dari uji Hausman sebagai berikut:

$H_0$ : model *random effect*

$H_1$ : model *fixed effect*

Kriteria penolakan hipotesis nol ( $H_0$ ) apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ). Berdasarkan tabel 5.5 nilai uji hausman signifikan pada tingkat kepercayaan  $\alpha=1\%$  yang berarti hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, maka model yang terbaik adalah model *fixed effect*.

Model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *Fixed Effect Model* dengan pendekatan GLS. Metode GLS (*Generalized Least Square*) dipilih dalam penelitian ini karena adanya nilai lebih yang dimiliki oleh GLS dibandingkan OLS dalam mengestimasi parameter regresi dan menurut Iswati et al., (2014) bahwa parameter GLS lebih efisien dan stabil dibandingkan parameter OLS. Metode OLS yang umum tidak mengasumsikan bahwa variansi variabel adalah heterogen. Metode GLS sudah memperhitungkan heterogenitas yang terdapat pada variabel independent secara eksplisit, sehingga metode ini mampu menghasilkan estimator yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) Gujarati & Porter (2009). Salah satu kelebihan metode GLS yaitu tidak perlu memenuhi asumsi klasik. (Kosmaryati et al., 2019).

## **B. Hasil estimasi penentuan model**

Dari hasil uji Chow dan uji Hausman model terbaik yang akan digunakan untuk mengetahui pengaruh upah minimum, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Tengah adalah model *Fixed Effect* (GLS).

## **C. Uji analisis statistik**

Uji analisis statistik adalah tahapan yang dilakukan setelah memilih estimasi model terbaik untuk menjawab dari hipotesis dalam penelitian ini. Setelah melalui pengujian pemilihan model model terbaik yang terpilih adalah model *Fixed Effect* (GLS). Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan maka persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\text{TK} = 40,960 - 2,846 \text{ UM} + 0,949 \text{ PKP} - 0,006 \text{ TPT} - 0,078 \text{ EDUC} + 0,104 \text{ HEALTH} + 0,077 \text{ FARM} + e$$

**Tabel 2**  
**Ringkasan Hasil Estimasi Regresi Model Fixed Effect (GLS)**

Variabel	Coefficient	Standart error	t-statistic	Prob.	Keterangan
Konstanta	40,96036	4,289867	9,548166	0,0000	
UM	-2,846332	0,373100	-7,628865	0,0000	negatif dan signifikan
PKP	0,949902	0,501096	1,895650	0,0604	positif dan signifikan
TPT	-0,006662	0,026183	-0,254451	0,7996	tidak signifikan
EDUC	-0,078424	0,046831	-1,674610	0,0966	negatif dan signifikan
HEALTH	0,104714	0,109784	0,953813	0,3421	tidak signifikan
FARM	0,07676	0,031822	2,440918	0,0161	positif dan signifikan
R <sup>2</sup>	0,947062				
Adjusted R <sup>2</sup>	0,938680				
Prob. F	0,0000				

Sumber: Lampiran (diolah)

#### 1. Uji Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Semakin besar nilai koefisien, maka semakin baik model tersebut dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap dependen.

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 5.6 menunjukkan bahwa nilai koefisien R<sup>2</sup> sebesar 0,9470 yang berarti variasi-variasi dari perubahan variabel pengaruh upah minimum, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan sektor pertanian, dapat menjelaskan sebesar 94,70% terhadap variasi variabel tingkat kemiskinan, sedangkan sebesar 5,3% dijelaskan oleh variasi variabel-variabel lain diluar model yang tercermin dalam variabel pengganggu (*error term*).

#### 2. Uji simultan (uji F)

Uji secara simultan dasarnya dilakukan untuk menunjukkan apakah upah minimum, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan sektor pertanian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 5.6 hasil regresi data panel menggunakan model *Fixed Effect (GLS)* menunjukkan bahwa nilai probabilitas F adalah 0,0000 yang berarti bahwa probabilitas  $F < \alpha = 1\%$ . Dapat disimpulkan bahwa keputusannya H<sub>0</sub> ditolak

atau H1 diterima yang berarti secara simultan atau bersama-sama variabel upah minimum, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan sektor pertanian berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil uji F menunjukkan bahwa besar kecilnya tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh upah minimum, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan sektor pertanian yang dimiliki oleh masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

### 3. Uji individual (uji t)

Uji individual dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat melalui nilai probabilitas t dari setiap variabel independen pada hasil regresi data panel dengan alpha atau taraf nyatanya.

Berdasarkan Tabel 5.8 uji signifikansi individual variabel upah minimum menunjukkan nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari nilai alpha  $\alpha=1\%$ , yang berarti bahwa upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Variabel pendapatan perkapita menunjukkan nilai probabilitas 0,0604 lebih kecil dari nilai alpha  $\alpha=10\%$ , yang berarti bahwa pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Variabel tingkat pengangguran terbuka menunjukkan nilai probabilitas 0,7996 lebih besar dari nilai alpha  $\alpha=10\%$ , yang berarti bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menunjukkan nilai probabilitas 0,0966 lebih kecil dari nilai alpha  $\alpha=10\%$ , yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan menunjukkan nilai probabilitas 0,3421 lebih besar dari nilai alpha  $\alpha=10\%$ , yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Variabel sektor pertanian menunjukkan nilai probabilitas 0,0161 lebih kecil dari nilai alpha  $\alpha=5\%$ , yang berarti bahwa sektor pertanian berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil uji parsial atau uji individual dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah dengan koefisien sebesar -2,8. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika ada kenaikan upah minimum sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2,8 persen. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian diterima.

Berdasarkan penelitian terdahulu Aprilia (2016) upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan adanya standar upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka akan memberikan penghasilan yang layak bagi para pekerja/karyawan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas pekerja juga akan meningkat. Hal tersebut juga merupakan perlindungan bagi para pekerja agar tidak terjerat dalam kemiskinan.

Sejalan dengan penelitian Kurniawati et al., (2017) yang menyatakan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara upah minimum dengan kemiskinan dikarenakan kenaikan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan dari pekerja sehingga dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan ketika pekerja tersebut termasuk dalam kategori miskin. Penetapan upah minimum juga salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan upah terendah dan upah tertinggi dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat bawah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum yang disampaikan oleh Kaufman (2000) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga terbebas dari kemiskinan. Penetapan upah minimum yang mendekati KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) dan diatas garis kemiskinan telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Berikut adalah perbandingan Upah Minimum Provinsi pada Regional Kalimantan pada tahun 2019:

- a. Kalimantan Utara : 2.765.463,00
- b. Kalimantan Timur : 2.747.561,00
- c. Kalimantan Tengah : 2.663.435,00
- d. Kalimantan Selatan : 2.651.782,00
- e. Kalimantan Barat : 2.211.500,00

Kalimantan Tengah berada pada urutan 3, lebih tinggi daripada upah minimum Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat namun lebih rendah daripada Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Artinya UMP di Kalimantan Tengah berada pada posisi yang relatif ditengah-tengah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah jika dibandingkan provinsi di sekitarnya.

Upah minimum di Indonesia sejak Januari 2001, otoritas penetapannya didesentralisasikan kepada Gubernur. Penetapan upah minimum dan persetujuan penangguhan pelaksanaan merupakan kewenangan pemerintah/gubernur. Proses perumusan angka UMP/ UMK, diatur mengikuti prosedur yakni melalui Dewan

Pengupahan (lembaga non-struktural) baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan agar dalam merumuskan UMP/ UMK itu, benar-benar merupakan hasil kajian menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian diharapkan upah minimum yang ditetapkan bersifat akseptabel.

Status Dewan Pengupahan adalah sebagai unit pemikir yang bersifat tripartit yang bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan, juga saran dan pertimbangan penetapan UMP dan UMK. Disebut tripartit karena keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri atas unsur pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akademisi, dan pakar (Sudiarta & Putra, 2015).

Dengan demikian penetapan upah minimum dapat menjaga stabilitas hubungan kerja di Kalimantan Tengah dan juga dapat dijadikan sebagai instrumen kebijakan untuk menurunkan kemiskinan.

## **2. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah dengan koefisien sebesar 0,94. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika ada kenaikan pendapatan perkapita sebesar 1 persen, maka dapat meningkatkan kemiskinan sebesar 0,94 persen.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Sukirno (2006) yang menyatakan pendapatan perkapita masyarakat di suatu daerah dapat dijadikan suatu parameter kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ketika pendapatan perkapita naik maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah sehingga kemiskinan dapat berkurang. Hal ini juga mengidentifikasi bahwa semakin besar pendapatan perkapita suatu masyarakat maka seharusnya semakin sejahtera juga suatu wilayah.

Sektor terbesar yang mendukung perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar & eceran reparasi mobil & sepeda. Secara umum terlihat bahwa pendapatan perkapita Kalimantan Tengah cukup tinggi disebabkan karena dukungan sektor pertanian sebesar 20,12 % terhadap total PDRB secara keseluruhan. Kemudian didukung juga oleh sektor industri pengolahan yang menyumbangkan sebesar 14,98 % terhadap total PDRB. Selanjutnya adalah sektor perdagangan besar & eceran reparasi mobil & sepeda yang menyumbangkan sebesar 13,25 % dari total PDRB secara keseluruhan.

Jika dilihat sektor yang paling dominan yaitu sektor pertanian pada tahun 2019, distribusi persentase PDRB pertanian terbesar adalah dari subsektor perkebunan yaitu 59,96%. Sedangkan untuk subsektor lain tanaman pangan 8,91 %, tanaman hortikultura 2,64%, peternakan 8,74%, perburuan 3,08%, kehutanan dan penebangan kayu 4,71% serta perikanan 11,96%. Artinya dalam sektor pertanian masih didominasi oleh perkebunan yaitu lebih spesifik lagi adalah perkebunan kelapa sawit yang mempengaruhi pendapatan perkapita di Kalimantan Tengah.

Permasalahan yang terjadi, manfaat ekonomi dari sub sektor perkebunan yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit ini tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ini disebabkan karena 88,92 % perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah di

kuasai oleh swasta sedangkan hanya sedikit saja yang merupakan perkebunan rakyat yaitu 11,08 %. Artinya keuntungan dari tingginya sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan hanya dinikmati oleh perusahaan dan membuat pendapatan perusahaan yang semakin tinggi, namun tidak dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Tengah secara umum.

Penelitian ini sejalan dengan Marmujiono (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan karena dampak peningkatan pendapatan perkapita belum merata ke seluruh masyarakat dan hanya sekelompok masyarakat saja yang merasakan peningkatannya.

Indeks Gini atau Rasio Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk (Badan Pusat Statistik, 2019).

Rasio Gini di Indonesia pada tahun 2019 berada pada angka 0,38. Tiga provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi yang jauh di atas rata-rata nasional adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (0,42), kedua adalah Gorontalo (0,41), dan yang ketiga adalah Jawa Barat (0,39). Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) Kalimantan Tengah tahun 2019 berada pada angka 0,336 hanya memiliki selisih 0,04 saja dari ketimpangan nasional (0,38) dan hanya memiliki selisih 0,08 dari gini rasio provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia (0,42). Hal ini membuktikan bahwa distribusi pendapatan di Kalimantan Tengah tidak merata.

Pendapatan perkapita tidak mencerminkan pemerataan pendapatan. Perhitungan pendapatan perkapita secara garis besar merupakan nilai keseluruhan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Jika dilihat dari nilai PDRB tinggi yang merupakan sumbangsih sub sektor perkebunan khususnya sawit kemudian dibagi secara merata terhadap jumlah penduduk di Kalimantan Tengah tentu tidak akan memberikan gambaran riil tentang seberapa besar sesungguhnya pendapatan perkapita masyarakat di Kalimantan Tengah. Hal ini tidak dapat pula dijadikan acuan untuk mengukur seberapa besar kesejahteraan dan kemampuan daya beli masyarakat sehingga wajar jika pendapatan perkapita meningkat maka kemiskinan akan ikut meningkat.

### **3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini dan tidak sesuai hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian tidak diterima.

Tidak semua orang yang sementara menganggur itu selalu miskin. Karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara empat kategori pengangguran terbuka diatas bahwa sebagian diantaranya ada yang masuk dalam sektor informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari yang ditentukan.

Selain itu ada yang sedang berusaha atau mempersiapkan usaha sendiri, ada juga yang sedang menunggu mulainya bekerja, ada juga yang mempunyai pekerjaan paruh waktu (part time) namun dengan penghasilan melebihi orang bekerja secara normal, dan yang mana semua golongan tersebut masuk dalam kategori pengangguran terbuka. Menurut Anjari & Nurhasanah (2012) kemiskinan mungkin tidak selalu berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Arsyad (2016) yang menyatakan bahwa salah jika beranggapan setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mukhtar et al., (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena orang-orang yang disebut menganggur belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka tetap miskin.

Tidak berpengaruhnya tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah bisa disebabkan karena tingkat pengangguran terbuka kurang dapat mencerminkan pengangguran secara keseluruhan di Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan tingkat pengangguran terbuka hanya dapat menggambarkan pengangguran yang ada di perkotaan saja sedangkan untuk daerah perdesaan sesungguhnya juga terdapat pengangguran terselubung.

#### **4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah dengan koefisien sebesar -0,07. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika ada kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,07 persen. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian diterima.

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dalam jangka pendek dan jangka

panjang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi dikarenakan hubungan pendidikan dengan tingkat kemiskinan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan. Ilmu dan keterampilan yang akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika seseorang memiliki pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya maka akan mendapatkan upah atau gaji yang layak, sehingga dengan memiliki penghasilan yang layak seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pada akhirnya ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka seseorang terhindar dari tingkat kemiskinan. Oleh karena itu ketika pendidikan meningkat maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan menurun.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudiharta & Sutrisna, 2014) bahwa pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu penelitian ini juga menyatakan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang di tempuh, maka akan tinggi juga produktivitas kerjanya. Seperti yang dikemukakan oleh (Arsyad, 1999) bahwa pendidikan berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui perbaikan produktivitas dan pelatihan pada golongan miskin sehingga akan meningkatkan pendapatan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam ilmu ekonomi sering disebut dengan mutu modal manusia atau human capital.

Menurut Wahyudi (2020) dukungan anggaran pemerintah untuk pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi sumber daya manusia (human capital investment) untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, alokasi anggaran untuk bidang pendidikan terus diupayakan relatif lebih besar dibandingkan bidang lainnya. Alokasi anggaran sektor publik ini difokuskan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan tenaga pendidikan yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga akan memberi dampak secara langsung terhadap proses pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

#### **5. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian tidak diterima.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Demak et al., (2020) berdasarkan pada studinya secara umum penelitian tersebut mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Setiap terjadi peningkatan satu unit pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, tidak diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan.

#### **6. Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah dengan koefisien sebesar -0,07. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika ada kenaikan sektor pertanian

sebesar 1 persen, maka dapat meningkatkan kemiskinan sebesar 0,07 persen.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sihombing & Bangun (2019) yang menyatakan terdapat korelasi yang kuat namun arah negatif antara kemiskinan dengan sektor pertanian. Ginantie (2016) juga menyatakan bahwa pertumbuhan sektor pertanian terbukti mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Namun masih diperlukan adanya langkah diversifikasi sektor pertanian guna meningkatkan value added pertanian serta sinergitas sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini karena wilayah dengan basis pertanian ternyata lebih lambat dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan wilayah nonbasis pertanian.

Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Salqaura, 2020) yang menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara sektor pertanian terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan karena persentase jumlah penduduk miskin justru yang tertinggi berada di daerah-daerah yang merupakan sentra pertanian di perdesaan. Sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan untuk mengentaskan kemiskinan mengingat pencaharian utama penduduk perdesaan adalah bertani.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Terbukti sebesar 20,12% dari total PDRB Kalimantan Tengah berasal dari sektor pertanian. Berdasarkan lapangan pekerjaan pada Agustus 2019, lapangan pekerjaan utama paling banyak di Kalimantan Tengah terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 38,01%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,69%, serta Adminitrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial 7,89% (Badan Pusat Statistik, 2019).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis tentang pengaruh upah minimum, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2019 yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Upah minimum, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan sektor pertanian secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. (2) Upah minimum dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Pendapatan perkapita dan sektor pertanian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. (3) Upah minimum merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

## BIBLIOGRAFI

- Adji, W., Suwerli, & Suratno. (2007). *Ekonomi Jilid 2*. Erlangga.
- Alfian, Tan, M. G., & Soemardjan, S. (1980). *Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga Rampai*. Pulsar.
- Anjari, A. ., & Nurhasanah, A. . (2012). *Analisis Pengaruh Pdrb Per Kapita Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2011*. UIN Sjarif Hidayatullah.
- Aprilia, R. D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2019a). *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2019*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2019b). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2020*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Baruwadi, M. A. (2018). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Boediono. (1993). *Ekonomi Makro, Seni Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. BPFE.
- Cervantes-Godoy, D., & Dewbre, J. (2010). Economic Importance of Agriculture for Poverty Reduction. *OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers*.
- Demak, S. N. K., Masinambow, V. A. ., & Londa, A. T. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Modal, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 20*.
- Fadlillah, N., Sukiman, & Dewi, A. S. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *EKO-REGIONAL, 11*.
- Ginantie, B. (2016). Analisis Dampak Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap Kemiskinan Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2003). *Ekonometrika Dasar*. Erlangga.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Hendra, R. (2010). *Determinan Kemiskinan Absolut di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2007*. Universitas Indonesia.
- Iswati, Helmi, Syahni, R., & Maiyastri. (2014). Perbandingan Penduga Ordinary Least Square (OLS) dan Generalized Least Square (GLS) Pada Model Regresi Linier dengan Regresor Bersifat Stokastik dan Galat Model Berautokorelasi. *Jurnal Matematika UNAND*.
- Jhingan, M. L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES.
- Kaufman, B. E. (2000). *The Economic of Labor Markets (Fifth)*. The Dryden Press.
- Kosmaryati, Handayani, C. A., Isfahani, R. N., & Widodo, E. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel. *Indonesian Journal of Applied Statistic, Volume 2 N*.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah Dan Kebijakan*. YPKN.
- Kurniawati, A., Gunawan, B. T., & Indrasari, D. P. R. (2017). Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2014. *Journal of Research in Economics Management, Volume 17*.
- Lanjouw. (2001). *Poverty, Education and Health in Indonesia. Who Benefits From Public Spending?* World Bank Working Paper No 2379.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mangkoesebroto. (1994). *Kebijakan Publik di Indonesia Subtansi dan Urgensi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marmujiono, S. P. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan strategi pengentasan kemiskinan di KAB. Brebes tahun 2009-2011. *Economics Development Analysis Journal UNNES*.
- Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). The Analysis of The Effects of Human Development Index and Opened Unemployment Levels to the Poverty in Indonesia. *Jurnal Ecoplan*.
- Nachrowi, D., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Universitas Indonesia.

- Nanga, M. (2001). *Makroekonomi : Teori, Masalah dan Kebijakan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Purnami, N. M. S., & Saskara, I. A. N. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Bali Tahun 2004-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Richardson, H. W. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Sajogyo. (1996). *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Aditya Media.
- Salqaura, S. S. (2020). Analisis Korelasi Sektor Pertanian Dengan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Agristan*.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi*. (Alih Bahasa Gretta, Theresa T, Bosco C, Anna E). Media Global Edukasi.
- Sharp, A. M., Register, C. A., & Leftwich, R. H. (1996). *Economics of Social Issues*. Richard D. Irwin.
- Sihombing, A. O., & Bangun, R. H. (2019). Analisis Korelasi Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara)*.
- Simanjuntak, P. J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Soetrisno. (1984). *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. BPFE.
- Sudiarta, K., & Putra, I. B. W. (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Upah Minimum. *Journal Ilmu Hukum, Vol. 03, N.*
- Sudiharta, P. S. P., & Sutrisna, K. (2014). Pengaruh PDRB Perkapita, Pendidikan, dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud, Vol. 3, No.*
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Prenada Media Group.
- Sukirno, S. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.

- Sumarsono, S. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Sumarsono, S. (2013). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu.
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika serta Pendekatan*. Salemba Empat.
- Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. UPP STIM YKPN.
- Widodo, A., Waridin, & Johanna Maria K. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1*.
- Wongdesmiwati. (2009). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2004. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

---

**Copyright holder:**

Nadya Chinthya, Muhammad Handry Imansyah, Dewi Rahayu (2022)

**First publication right:**

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

**This article is licensed under:**

